

MEDIA GLOBAL VERSUS RESISTENSI LOKAL PADA DEEPPAKE PORNOGRAFI SEBAGAI ALAT DEHUMANISASI PEREMPUAN DALAM BUDAYA KONSERVATIF

Muhammad Kanzul Fikri¹

Secondkanzul5822@gmail.com

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sholahudin Hasby Yusuf Al-Ayyubi²

sholahudinhasby@gmail.com

Universitas Negeri Semarang

§§§

Abstrak

Artikel ini menganalisis bagaimana media global, melalui fenomena deepfake pornografi, memengaruhi identitas gender perempuan dalam konteks budaya konservatif. Media global sering mereproduksi representasi perempuan dalam kacamata hegemoni Barat yang liberal, yang kerap bertentangan dengan nilai-nilai Timur yang lebih normatif dan patriarkal. Dalam budaya Barat, narasi kebebasan seksual sering dilihat sebagai bentuk otonomi individu, sedangkan dalam budaya Timur, hal tersebut dapat dibaca sebagai pelanggaran terhadap kehormatan kolektif. Meski berbeda, keduanya sama-sama berisiko memfasilitasi dehumanisasi perempuan melalui media yang mengeksploitasi tubuh mereka. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis terhadap representasi deepfake pornografi dalam media digital dan tanggapan masyarakat konservatif terhadapnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa media global dapat menjadi alat pemberdayaan jika digunakan untuk mendekonstruksi stereotip gender dan memperkuat narasi alternatif yang berakar pada nilai lokal. Pendekatan lintas budaya diperlukan agar pemberdayaan tidak bersifat homogen dan bias budaya dominan.

Kata kunci: *Media Global, Deepfake Pornografi, Gender.*

Abstract

This article analyzes how global media, through the phenomenon of deepfake pornography, influences women's gender identity in a conservative cultural context. Global media often produces representations of women through the lens of liberal Western hegemony, which often conflicts with more normative and patriarchal Eastern values. In Western culture, the narrative of sexual freedom is often seen as a form of individual autonomy, while in Eastern culture, it can be read as a violation of collective honor. Although different, both are at risk of facilitating the dehumanization of women through media that exploits their bodies. This study uses a qualitative approach with a critical discourse analysis of the representation of deepfake pornography in digital media and conservative responses to its society. The results of the analysis show that global media can be a tool of empowerment if used to deconstruct

gender stereotypes and strengthen alternative narratives that are erased from local values. A cultural approach is needed so that empowerment is not homogeneous and biased by the dominant culture.

Keywords: Global Media, Deepfake Pornography, Gender.

§§§

PENDAHULUAN

Kemunculan teknologi deepfake merupakan bagian dari perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam bidang pemrosesan gambar dan video. Istilah "deepfake" berasal dari gabungan kata "deep learning" dan "fake", yang merujuk pada metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk menciptakan konten visual atau audio yang sangat realistis namun palsu (Kasita, 2022). Deepfake pertama kali muncul pada tahun 2017 di forum daring Reddit, di mana pengguna mulai mengunggah video pornografi yang wajahnya telah diganti dengan wajah selebriti perempuan menggunakan teknologi AI. Sejak saat itu, teknologi deepfake berkembang sangat cepat. Kemajuan dalam algoritma generatif, seperti Generative Adversarial Networks (GANs), telah membuat video deepfake semakin sulit dibedakan dari yang asli. Awalnya dikembangkan untuk keperluan hiburan atau eksperimen teknologis, deepfake dengan cepat disalahgunakan, terutama dalam konteks pornografi non-konsensual (Mrs Supriya Shree et al., 2024).

Dalam konteks pornografi, deepfake menjadi alat yang sangat berbahaya. Video deepfake pornografi sering kali menggunakan wajah perempuan publik termasuk selebriti, politisi, atau tokoh masyarakat dan menempelkannya pada tubuh aktor dalam video porno. Hal ini menciptakan ilusi bahwa perempuan tersebut terlibat dalam tindakan seksual, meskipun kenyataannya tidak demikian. Penyalahgunaan ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang besar terhadap korban. Mereka mengalami kerusakan reputasi, pelecehan daring, tekanan mental, serta kesulitan dalam kehidupan profesional dan personal. Dalam masyarakat yang konservatif, efeknya bisa lebih parah, karena korban tidak hanya dijadikan objek seksual secara tidak sah, tetapi juga sering kali disalahkan atau dikucilkan.

Menurut laporan dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2019, sekitar 96% dari semua video deepfake yang beredar di internet adalah video pornografi, dan 100% dari video tersebut menggunakan wajah perempuan. Laporan ini menunjukkan betapa timpangnya penggunaan teknologi ini dan bagaimana ia

menjadi alat baru dalam pelecehan gender berbasis teknologi. Dalam laporan terbaru oleh Internet Watch Foundation (IWF) pada tahun 2022, jumlah video deepfake yang beredar di internet meningkat dua kali lipat setiap enam bulan. Mereka juga melaporkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan publik dari Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang, yang memiliki komunitas daring yang besar dan sering menjadi sasaran fetishisasi oleh pengguna global (Mutmainnah et al., 2024).

Dalam masyarakat konservatif, seperti di banyak negara Asia, perempuan yang menjadi korban deepfake pornografi menghadapi stigma berlapis. Selain dirugikan oleh penyebaran konten palsu tersebut, mereka juga menghadapi tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, norma agama, dan ekspektasi gender yang ketat. Teknologi deepfake pornografi dalam konteks ini menjadi bentuk dehumanisasi yang sangat nyata. Wajah perempuan dipisahkan dari identitas, agensi, dan kemanusiaannya, lalu dijadikan objek fantasi seksual yang bisa diproduksi dan dikonsumsi tanpa batas. Ini memperkuat struktur patriarki yang melihat tubuh perempuan sebagai komoditas publik.

Kritik terhadap deepfake pornografi tidak hanya datang dari kalangan feminis, tetapi juga dari aktivis digital, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menekankan bahwa teknologi seharusnya tidak menjadi alat untuk memperkuat ketimpangan gender atau menyebarkan kekerasan berbasis gender (Mahardika, 2025). Beberapa bentuk resistensi lokal mulai bermunculan. Di Indonesia, misalnya, komunitas digital dan aktivis gender telah melakukan kampanye kesadaran tentang bahaya deepfake, serta mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE agar mencakup kejahatan berbasis teknologi terbaru ini (Adnasohn Aqilla Respati, 2024).

Platform-platform daring juga mulai mengambil langkah-langkah untuk melarang konten deepfake pornografi. Namun, implementasinya sering kali tidak konsisten dan masih terdapat banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Sebagian komunitas daring juga melakukan inisiatif swadaya untuk melacak dan menghapus konten deepfake yang beredar, serta membantu korban untuk memulihkan citra publik mereka. Namun, upaya ini sering terbatas sumber daya dan hanya mampu menjangkau sebagian kecil kasus.

Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika teknologi. Menyadarkan pengguna internet bahwa menyebarkan atau mengonsumsi konten deepfake pornografi adalah bentuk kekerasan, dan bukan sekadar hiburan atau keisengan, adalah langkah awal yang penting. Dalam konteks masyarakat konservatif, perubahan norma sosial dan kultural menjadi tantangan tersendiri. Namun, resistensi lokal dapat dimulai dari ruang-ruang kecil sekolah, komunitas seni, organisasi keagamaan progresif yang membuka diskusi tentang tubuh, seksualitas, dan kekerasan digital dengan pendekatan yang humanis dan empatik (Rahman & Bari, 2023).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi bagaimana deepfake pornografi tidak hanya merupakan bentuk kekerasan digital, tetapi juga alat dehumanisasi terhadap perempuan yang memperkuat norma-norma patriarkal, terutama di masyarakat konservatif. Lebih dari itu, tulisan ini ingin menelaah bagaimana resistensi lokal baik melalui kampanye, edukasi, maupun aksi kolektif dapat menjadi titik awal perlawanan terhadap bentuk kekerasan baru ini. Dengan demikian, deepfake pornografi harus dilihat bukan hanya sebagai masalah teknologi atau privasi, tetapi sebagai isu sosial dan politik yang menuntut tanggung jawab bersama. Kesadaran kolektif dan solidaritas lintas komunitas menjadi kunci dalam melawan bentuk kekerasan yang terus bertransformasi ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Penulis mengkaji berbagai laporan riset, artikel akademik, pemberitaan media, serta dokumentasi kampanye digital terkait fenomena deepfake pornografi. Data sekunder dari organisasi seperti WHO dan IWF digunakan untuk mendukung argumen secara statistik. Selain itu, pendekatan feminis kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana teknologi deepfake memperkuat relasi kuasa patriarkal. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami dampak sosial dan kultural terhadap perempuan, khususnya di masyarakat konservatif. Tulisan ini tidak bertujuan memberikan generalisasi, melainkan membangun pemahaman kritis atas fenomena yang terus berkembang.

PEMBAHASAN DALAM ISI

Deepfake pornografi memengaruhi identitas gender

Media global telah menjadi kekuatan besar dalam menyebarkan nilai-nilai universal tentang gender, seksualitas, dan representasi tubuh perempuan. Dalam era digital, arus media yang begitu kuat tidak hanya menciptakan narasi tunggal tentang perempuan, tetapi juga menyusup ke dalam budaya-budaya lokal, termasuk budaya konservatif yang memiliki pandangan dan nilai-nilai berbeda mengenai peran dan identitas perempuan. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya teknologi manipulatif seperti deepfake pornografi, yang menghadirkan bentuk baru dari kekerasan berbasis gender yang menasar perempuan secara digital (Fernandes & Fatma, 2025).

Identitas gender perempuan dalam budaya konservatif umumnya dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai moral, agama, dan adat yang kuat. Perempuan diposisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga dan komunitas, yang harus menjaga kesucian tubuh dan perilakunya sesuai dengan norma sosial yang berlaku (Syahirah & Prasetyo, 2025). Dalam konteks ini, tubuh perempuan bukan hanya milik individu, tetapi juga simbol dari martabat sosial keluarga dan masyarakat. Ketika media global menghadirkan representasi perempuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti citra perempuan yang hiper-seksual atau otonom secara seksual, maka akan terjadi benturan identitas yang signifikan.

Deepfake pornografi menjadi salah satu produk media digital yang ekstrem dalam menggambarkan benturan ini. Melalui teknologi kecerdasan buatan, wajah perempuan dapat ditempelkan ke tubuh dalam video pornografi secara meyakinkan, tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban. Praktik ini tidak hanya merupakan bentuk kekerasan seksual digital, tetapi juga alat yang sangat efektif untuk mendehumanisasi perempuan (Mutmainnah et al., 2024). Dalam budaya konservatif, di mana reputasi dan kehormatan sangat dijaga, dampaknya menjadi sangat destruktif.

Media global memainkan peran ganda dalam konteks ini. Di satu sisi, ia menjadi saluran penyebaran teknologi dan budaya yang memungkinkan lahirnya praktik-praktik seperti deepfake. Di sisi lain, ia juga menjadi sumber inspirasi bagi sebagian perempuan yang ingin melepaskan diri dari norma-norma patriarkal dan mengekspresikan identitasnya secara bebas. Dualitas ini menciptakan ketegangan yang tidak mudah diurai, terutama bagi perempuan yang hidup di tengah budaya yang sangat membatasi ekspresi dirinya.

Di banyak kasus, perempuan korban deepfake dalam masyarakat konservatif tidak hanya harus menghadapi trauma psikologis karena merasa dipermalukan, tetapi juga stigma sosial yang sangat kuat. Mereka bisa dikucilkan oleh keluarga, dianggap sebagai pembawa aib, atau bahkan menjadi korban kekerasan domestik karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari deepfake pornografi tidak berhenti di ranah digital, tetapi menyentuh realitas sosial dan budaya yang keras.

Ironisnya, media global sering kali mempromosikan kebebasan berekspresi dan emansipasi perempuan, tetapi tidak menyediakan perlindungan yang memadai ketika teknologi yang sama digunakan untuk merendahkan perempuan. Tidak ada mekanisme global yang kuat untuk mengatasi kejahatan digital seperti deepfake pornografi, sementara dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang secara total. Hal ini menciptakan kesenjangan antara idealisme media global dan realitas yang dihadapi perempuan di masyarakat konservatif.

Resistensi lokal pun muncul sebagai respons terhadap dominasi media global dan penetrasi teknologi destruktif seperti deepfake. Bentuk resistensi ini bermacam-macam, mulai dari gerakan sosial berbasis komunitas, peningkatan kesadaran digital di kalangan perempuan, hingga desakan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi korban kekerasan digital(2024). Dalam beberapa kasus, perempuan dari masyarakat konservatif mulai membangun narasi alternatif tentang identitas dirinya yang tidak bergantung pada standar media global.

Perlu diketahui bahwa resistensi lokal tidak selalu berarti konservatif atau anti-modernitas. Sebaliknya, resistensi ini bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap eksploitasi dan dehumanisasi yang dilakukan oleh kekuatan teknologi global. Dalam banyak budaya, resistensi ini berbasis pada nilai-nilai komunitas seperti saling menjaga, solidaritas, dan martabat manusia. Nilai-nilai ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk melawan narasi global yang merendahkan perempuan menjadi objek seksual digital.

Identitas gender perempuan dalam masyarakat konservatif sedang mengalami tarik-menarik antara dua kekuatan besar modernitas global dan tradisi lokal. Media global terus menyebarkan citra perempuan yang bebas, terbuka, dan konsumtif secara seksual, sementara budaya lokal masih mempertahankan narasi tentang perempuan sebagai simbol moralitas. Dalam pertarungan ini, tubuh perempuan

menjadi medan konflik simbolik dan digital, yang kerap kali merugikan mereka sendiri (Untung Sumarwan, 2025).

Masalah ini juga diperparah oleh rendahnya literasi digital di banyak komunitas konservatif. Perempuan tidak hanya menjadi korban karena keterbatasan teknologi, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menjaga keamanan digital dan mengidentifikasi ancaman seperti deepfake. Kurangnya edukasi membuat perempuan semakin tidak berdaya dalam menghadapi serangan berbasis teknologi ini.

Media lokal bisa menjadi benteng pertama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. Melalui narasi yang lebih sensitif terhadap konteks budaya, media lokal dapat menjadi ruang untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya eksploitasi digital dan pentingnya membela korban, bukan menyalahkan mereka (Azkia et al., 2024). Sayangnya, media lokal juga sering terpengaruh oleh nilai-nilai patriarkal yang sama, sehingga tidak jarang malah memperkuat stigma terhadap korban.

Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan interseksional. Perlindungan terhadap perempuan dari deepfake pornografi tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, budaya, dan rekonstruksi sosial tentang identitas perempuan. Masyarakat perlu melihat perempuan bukan sebagai representasi kehormatan kolektif semata, tetapi sebagai individu yang memiliki hak atas tubuh dan identitas digitalnya (Santiko & Bahri, 2024).

Perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam diskusi tentang teknologi, hukum digital, dan media. Mereka tidak bisa terus-menerus diposisikan sebagai korban pasif. Dengan pelibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan digital, resistensi lokal dapat menjadi lebih berdaya dan kontekstual dalam menghadapi ancaman media global.

Feminisme digital dapat menjadi jembatan antara narasi global dan lokal. Dengan mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal, feminisme digital dapat mengembangkan strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang tidak bertabrakan dengan budaya, melainkan menyatu dan memperkuatnya (Algamar & Ampri, 2022). Hal ini penting agar upaya perlindungan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai bentuk kolonisasi budaya.

Identitas gender perempuan adalah sesuatu yang kompleks dan terus berubah. Ia terbentuk oleh pengalaman sosial, budaya, dan kini juga oleh pengalaman digital. Deepfake pornografi adalah bentuk ekstrem dari bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi dan merusak identitas tersebut. Namun, melalui resistensi lokal yang cerdas, kritis, dan berorientasi pada hak perempuan, identitas ini dapat direbut kembali dan direkonstruksi dengan cara yang lebih manusiawi.

Dunia maya tidak boleh menjadi tempat yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Harus ada upaya global dan lokal yang menyatu untuk menciptakan ruang digital yang aman dan adil bagi semua, terutama perempuan dari budaya konservatif yang paling rentan terhadap eksploitasi digital. Media global harus bertanggung jawab dalam menyebarkan narasi yang tidak hanya menjual sensasi, tetapi juga mempromosikan etika dan hak asasi (Jufri & Putra, 2021).

Pada akhirnya, pertarungan antara media global dan resistensi lokal bukanlah soal menang atau kalah, melainkan bagaimana membangun jembatan nilai yang memungkinkan perempuan memiliki ruang aman untuk mengekspresikan identitasnya baik dalam dunia nyata maupun digital. Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan penindasan. Dan untuk itu, identitas gender perempuan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah: perempuan itu sendiri.

Deepfake dari perspektif barat dan timur

Dalam konteks globalisasi media, teknologi deepfake telah menjadi salah satu alat yang semakin banyak digunakan untuk menciptakan konten pornografi tanpa persetujuan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi persepsi terhadap isu tersebut, terutama dalam membandingkan perspektif antara masyarakat Barat dan Timur (2024). Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi persoalan ini, meskipun di beberapa titik juga memiliki kesamaan, khususnya dalam hal kekhawatiran terhadap pelanggaran privasi dan dehumanisasi perempuan.

Perspektif Barat cenderung menempatkan isu ini dalam kerangka hak individu, kebebasan berekspresi, dan etika teknologi. Di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, diskusi mengenai deepfake pornografi berfokus pada bagaimana hal tersebut melanggar hak digital, privasi, serta martabat individu. Banyak lembaga advokasi dan kebijakan publik di Barat yang mendorong regulasi teknologi secara lebih ketat untuk melindungi individu dari penyalahgunaan konten

digital berbasis AI(Mu et al., 2024). Sementara itu, di Timur terutama dalam budaya konservatif seperti di Asia Selatan, Timur Tengah, dan sebagian Asia Tenggara resistensi terhadap deepfake pornografi tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hak individu, tetapi juga menyentuh aspek moralitas, kehormatan keluarga, dan norma sosial. Dalam masyarakat ini, perempuan sering kali menjadi simbol kehormatan keluarga atau komunitas, sehingga korban deepfake pornografi menghadapi stigma sosial yang lebih besar dibandingkan dengan konteks Barat.

Budaya Timur cenderung memperlakukan isu ini sebagai ancaman terhadap struktur sosial dan nilai-nilai tradisional. Akibatnya, reaksi terhadap deepfake sering kali bersifat represif, termasuk sensor media, pembatasan teknologi digital, atau bahkan kriminalisasi korban dalam beberapa kasus(Mrs Supriya Shree et al., 2024). Alih-alih hanya fokus pada pelaku dan teknologi, masyarakat konservatif di Timur terkadang menyalahkan perempuan karena dianggap melanggar norma kesopanan, meskipun mereka adalah korban. Di sisi lain, Barat cenderung lebih terbuka dalam mendiskusikan seksualitas dan representasi tubuh dalam media. Namun, ini juga menimbulkan tantangan ketika batas antara kebebasan berekspresi dan eksploitasi menjadi kabur. Dalam beberapa kasus, media global yang berakar dari nilai-nilai Barat memperkuat objektifikasi tubuh perempuan melalui produksi konten hiburan yang hiperseksual(Rohmawati et al., 2024).

Ironisnya, media global yang didominasi oleh nilai-nilai Barat justru berkontribusi dalam menyebarkan budaya visual yang memungkinkan terjadinya dehumanisasi perempuan melalui teknologi seperti deepfake. Hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara produsen konten yang memiliki akses teknologi dan perempuan sebagai objek pasif yang dieksploitasi secara visual. Kesamaan antara Barat dan Timur dalam isu ini terletak pada meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan privasi digital dan martabat manusia. Baik masyarakat Barat maupun Timur sama-sama mengecam penyalahgunaan teknologi deepfake yang melibatkan individu tanpa persetujuan mereka, terutama ketika berkaitan dengan konten seksual(Rohmawati et al., 2024).

Namun, perbedaan utama muncul dalam bentuk resistensi lokal yang dilakukan di Timur. Banyak komunitas konservatif di Timur menanggapi fenomena ini dengan membangun narasi resistensi berbasis nilai lokal, seperti kampanye moralitas, gerakan pemurnian budaya, dan penguatan norma keagamaan. Strategi resistensi ini

tidak hanya ditujukan kepada teknologi, tetapi juga kepada pengaruh global yang dianggap mengancam nilai-nilai lokal. Resistensi lokal ini terkadang menghasilkan bentuk pengawasan sosial yang ketat terhadap perempuan. Misalnya, kontrol terhadap pakaian, penggunaan media sosial, dan interaksi di ruang publik menjadi semakin dibatasi sebagai bentuk “pencegahan” terhadap potensi menjadi korban (Novyanti & Astuti, 2022). Ini menciptakan paradoks perempuan yang menjadi korban justru dibatasi kebebasannya atas nama perlindungan budaya.

Sementara di Barat, gerakan feminis digital mulai mendorong keterlibatan teknologi untuk melawan teknologi. Misalnya, dengan mengembangkan alat pendeteksi deepfake, kampanye advokasi online, dan lobi untuk menciptakan undang-undang perlindungan data pribadi dan hak atas citra diri. Ini menandakan bahwa resistensi terhadap deepfake pornografi di Barat cenderung lebih progresif dalam pendekatannya (Fernandes & Fatma, 2025). Namun, resistensi lokal di Timur juga tidak bisa diremehkan. Dalam beberapa kasus, muncul gerakan feminis lokal yang mencoba menantang norma patriarkal sambil tetap mempertahankan identitas budaya. Gerakan-gerakan ini menggabungkan nilai-nilai lokal dengan wacana keadilan gender global, menciptakan bentuk hibrid dari perlawanan terhadap dehumanisasi perempuan.

Perspektif Timur juga seringkali menempatkan perempuan dalam posisi simbolis sebagai penjaga moral komunitas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap citra perempuan bukan hanya dilihat sebagai serangan terhadap individu, melainkan juga terhadap komunitas. Ini membuat perlawanan terhadap deepfake pornografi memiliki dimensi kolektif yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan individualistik di Barat.

Media global berperan ganda di satu sisi menciptakan narasi dominan tentang seksualitas perempuan yang dapat dieksploitasi, di sisi lain menyebarkan kesadaran akan pentingnya perlindungan digital dan keadilan gender. Hal ini menciptakan ketegangan antara pengaruh global yang liberal dan resistensi lokal yang konservatif (Mu et al., 2024). Perbedaan lainnya terletak pada struktur hukum dan penegakan hukum. Di Barat, perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi relatif lebih maju, dengan beberapa negara sudah memiliki undang-undang khusus yang melarang pembuatan dan penyebaran konten semacam itu. Di Timur, meskipun beberapa negara mulai mengadopsi regulasi digital, implementasinya

sering kali terhambat oleh birokrasi dan norma sosial yang membatasi perempuan berbicara.

Pendidikan digital juga menjadi titik perbedaan. Di Barat, literasi digital dan kesadaran tentang keamanan data pribadi menjadi bagian dari kurikulum atau kampanye publik. Sementara di Timur, terutama dalam masyarakat konservatif, topik-topik seperti seksualitas digital dan privasi sering dianggap tabu untuk dibahas secara terbuka, sehingga korban deepfake sering kali tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana melindungi diri. Perempuan di kedua belahan dunia menghadapi risiko yang sama dari teknologi ini, tetapi konteks sosial dan kultural mempengaruhi bagaimana mereka dimaknai, direspon, dan dilindungi. Di Barat, perempuan mungkin lebih mudah mengakses dukungan hukum dan sosial, sedangkan di Timur, mereka sering kali harus menghadapi tekanan sosial yang jauh lebih besar (Christina Basanova, 2025).

Perspektif feminis Barat menyoroti pentingnya otonomi tubuh dan hak digital, sedangkan feminisme di Timur sering kali harus bernegosiasi dengan norma agama, adat, dan moralitas komunitas. Ini menciptakan tantangan unik dalam membangun solidaritas global terhadap isu deepfake pornografi. Media global yang liberal sering kali tidak mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal ketika menyiarkan representasi perempuan, yang dapat memperburuk ketimpangan gender di masyarakat konservatif. Di sisi lain, budaya konservatif yang terlalu protektif bisa memperkuat patriarki dan menghambat pemberdayaan perempuan untuk melawan eksploitasi digital. Perspektif Timur sering kali lebih menekankan pada komunitas dan kolektivitas dalam menjaga kehormatan sosial, sedangkan perspektif Barat lebih individualistik dan menekankan kebebasan serta perlindungan hak pribadi (Agung et al., 2023). Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menghadapi tantangan teknologi deepfake.

Dalam banyak kasus, korban deepfake di Timur tidak hanya mengalami pelecehan digital, tetapi juga pengucilan sosial, kehilangan pekerjaan, dan tekanan keluarga. Ini memperlihatkan betapa besar dampak sosial dari deepfake dalam budaya yang sangat konservatif dan kolektivistik. Sebaliknya, di Barat, meskipun korban mungkin tidak mengalami tekanan sosial sebesar di Timur, mereka tetap menghadapi trauma psikologis yang signifikan dan eksploitasi yang tersebar secara luas di internet global, menunjukkan bahwa tantangan bersifat global, meskipun

dimensi sosialnya berbeda (Novyanti & Astuti, 2022). Maka dari itu, penting untuk membangun jembatan dialog antara perspektif Barat dan Timur dalam menyikapi isu ini. Pendekatan yang terlalu liberal atau terlalu konservatif sama-sama berisiko gagal melindungi korban. Yang dibutuhkan adalah kebijakan global yang sensitif terhadap konteks lokal, namun tetap berpihak pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender.

Kesimpulannya, perbandingan antara perspektif Barat dan Timur terhadap deepfake pornografi sebagai alat dehumanisasi perempuan menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan, nilai, dan strategi resistensi. Namun, keduanya sepakat bahwa penyalahgunaan teknologi untuk mengeksploitasi perempuan merupakan bentuk kekerasan yang harus dilawan. Resistensi lokal perlu diberdayakan dengan pendekatan kontekstual, sementara media global perlu dikritisi agar tidak mereproduksi ketidaksetaraan yang sama melalui teknologi baru.

Deepfake untuk pemberdayaan perempuan

Media global memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk opini publik dan menata ulang narasi sosial, termasuk narasi mengenai gender (Syahirah & Prasetyo, 2025). Dalam konteks "Media Global Versus Resistensi Lokal pada Deepfake Pornografi sebagai Alat Dehumanisasi Perempuan dalam Budaya Konservatif", peran media global menjadi sangat krusial untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan melawan bentuk dehumanisasi baru yang dimungkinkan oleh teknologi digital seperti deepfake. Namun, dukungan terhadap pemberdayaan perempuan harus dilakukan tanpa terjebak dalam pengulangan stereotip gender yang justru memperlemah posisi perempuan di ruang publik.

Deepfake pornografi adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis teknologi yang sangat berbahaya karena dapat menyerang martabat seseorang tanpa keterlibatan langsung korban. Dalam budaya konservatif, di mana kehormatan perempuan sering dikaitkan dengan tubuh dan citra, efeknya bisa sangat menghancurkan. Di sinilah media global dapat berperan untuk menciptakan narasi tandingan narasi yang menolak menyalahkan korban dan justru membongkar sistem yang memungkinkan teknologi ini disalahgunakan (Agung et al., 2023).

Alih-alih mengeksploitasi cerita korban deepfake pornografi untuk kepentingan sensasi atau rating, media global dapat memfokuskan liputannya pada aspek struktural dari masalah ini. Ini mencakup sistem hukum yang belum memadai,

ketimpangan gender dalam teknologi, serta bias budaya yang membuat perempuan lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital (Hapid et al., 2024). Pemberdayaan melalui media berarti memberi ruang pada perempuan untuk berbicara atas pengalaman mereka tanpa diposisikan sebagai objek pasif penderitaan.

Media global juga bisa menampilkan perempuan sebagai subjek yang aktif dalam perlawanan terhadap deepfake pornografi. Misalnya, dengan mengangkat aktivis, pengacara, jurnalis, dan teknolog perempuan yang terlibat dalam kampanye anti-kekerasan digital, media bisa membentuk citra perempuan yang kuat, cerdas, dan berdaya. Representasi ini penting untuk menggeser pandangan dominan yang selama ini cenderung melihat perempuan sebagai korban atau objek semata.

Dalam budaya konservatif, resistensi terhadap perubahan sosial sering kali dibungkus dalam narasi moralitas dan agama. Media global dapat berperan sebagai jembatan dengan tidak serta-merta memosisikan budaya lokal sebagai penghambat kemajuan, tetapi mendorong dialog kritis yang tetap menghormati konteks nilai setempat (Wirakusunah, 2024). Misalnya, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama atau budaya yang progresif, narasi pemberdayaan bisa diterima secara lebih luas.

Penting bagi media global untuk menghindari jebakan narasi penyelamatan ("rescue narrative") di mana perempuan dari budaya konservatif digambarkan sebagai pihak yang perlu diselamatkan oleh budaya Barat yang dianggap lebih maju. Pendekatan semacam ini justru memperkuat stereotip kolonial dan melemahkan agensi lokal. Sebaliknya, media seharusnya menyoroti inisiatif lokal yang lahir dari komunitas sendiri sebagai bentuk resistensi yang otentik dan bermakna (Amelia et al., 2024).

Pemberdayaan perempuan melalui media juga bisa difasilitasi lewat ruang-ruang partisipatif, seperti dokumenter interaktif, forum diskusi daring, dan platform opini yang memberikan tempat bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk berbagi gagasan. Ini bukan hanya tentang representasi, tetapi tentang kepemilikan narasi siapa yang berbicara, tentang siapa, dan untuk siapa narasi itu ditulis.

Ketika perempuan diberi ruang untuk berbicara dan mendefinisikan diri mereka sendiri, stereotip lama bisa dilawan. Misalnya, dalam liputan tentang korban deepfake, media bisa menghindari visualisasi berlebihan terhadap tubuh korban, dan memilih untuk menampilkan sisi perjuangan hukum, pemulihan psikologis, atau aksi komunitas

yang mendukung korban. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya penderita, tetapi juga agen perubahan.

Media global juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi audiensnya tentang pentingnya literasi digital dan kesadaran gender (Rahman & Bari, 2023). Dalam konteks ini, kampanye sosial lintas platform bisa menjadi alat yang sangat efektif. Melibatkan influencer, seniman, dan tokoh publik yang sadar gender bisa membantu menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terjebak dalam gaya komunikasi formal atau akademik yang kaku.

Stereotip gender sering kali diperkuat melalui representasi visual. Oleh karena itu, penting bagi media untuk memperhatikan bagaimana perempuan digambarkan dalam foto, video, dan desain grafis. Penggunaan citra yang manusiawi, tidak objektifikatif, dan inklusif terhadap keragaman perempuan dari berbagai budaya dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih kompleks dan adil tentang identitas perempuan.

Dalam masyarakat konservatif, perempuan sering diposisikan sebagai penjaga moralitas keluarga dan komunitas. Media global dapat menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap perempuan terutama dalam bentuk deepfake pornografi adalah pelanggaran terhadap nilai inti dari komunitas itu sendiri (Amelia et al., 2024). Dengan kata lain, membingkai pemberdayaan sebagai bagian dari perlindungan martabat bersama, bukan sebagai ancaman terhadap budaya.

Perlu ada kesadaran bahwa teknologi tidak netral. Deepfake bukan hanya soal kecanggihan digital, tetapi juga tentang siapa yang mengontrol teknologi dan untuk kepentingan siapa teknologi itu digunakan. Media global dapat mengangkat isu ini dengan mengaitkan antara ketimpangan gender dalam sektor teknologi dan maraknya penyalahgunaan teknologi terhadap perempuan.

Sebagai platform global, media juga dapat mendorong solidaritas lintas negara, lintas budaya. Dengan mengangkat cerita-cerita dari berbagai konteks lokal, media global menciptakan pemahaman bahwa meskipun bentuknya berbeda, kekerasan berbasis gender adalah masalah universal (Mutmainnah et al., 2024). Hal ini bisa menjadi dasar pembentukan jaringan solidaritas global yang saling mendukung dan memperkuat.

Namun demikian, penting untuk selalu menyadari bahwa resistensi lokal tidak selalu berarti penolakan terhadap nilai-nilai kesetaraan. Banyak komunitas yang sedang berada dalam proses negosiasi budaya, dan media harus cukup sensitif untuk tidak memperkeruh atau memperkerdikan proses tersebut. Dialog, bukan dominasi, adalah pendekatan yang paling berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini juga mencakup aspek hukum. Media global dapat menjadi alat advokasi untuk mendorong negara-negara memperbarui undang-undang terkait kejahatan digital dan kekerasan berbasis gender. Dengan menyoroti celah hukum, tekanan publik internasional bisa mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional (Adena Fitri Puspita Sari & Adi Sulistiyono, 2024).

Selain itu, media dapat menjadi alat pendidikan alternatif, terutama di tempat di mana sistem pendidikan formal belum memasukkan isu-isu gender dan teknologi secara memadai. Program podcast, serial YouTube, hingga kampanye TikTok bisa dirancang untuk membangun kesadaran sejak usia muda tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak digital.

Peran media global juga dapat diperluas ke dalam pengawasan dan akuntabilitas terhadap platform teknologi yang menjadi wadah penyebaran deepfake pornografi. Liputan investigatif, laporan kolaboratif dengan LSM, atau tekanan publik melalui kampanye sosial dapat mendorong perusahaan teknologi untuk bertanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan produknya. Sangat penting bahwa media tidak mengasosiasikan tubuh perempuan dengan rasa malu. Dalam banyak kasus, korban deepfake dikucilkan bukan karena kesalahannya, tetapi karena budaya malu yang dilekatkan pada tubuh perempuan (Rakhmawati, 2024). Media bisa melawan ini dengan mengubah narasi bukan korban yang harus malu, melainkan pelaku dan sistem yang melindungi mereka.

Kritik terhadap budaya konservatif tidak harus dilakukan dengan cara yang merendahkan. Sebaliknya, media bisa menggali nilai-nilai dalam budaya tersebut yang sebenarnya mendukung keadilan, martabat, dan solidaritas. Dengan mengangkat nilai-nilai ini, media dapat mengadvokasi perubahan dari dalam, bukan hanya memaksakan dari luar. Dalam menghindari stereotip, media global perlu memperhatikan diversitas perempuan. Tidak semua perempuan dari budaya konservatif adalah korban yang diam. Banyak dari mereka adalah pemikir, seniman,

pejuang hukum, dan pemimpin komunitas. Menampilkan keberagaman ini adalah kunci untuk menciptakan narasi yang adil dan membebaskan.

Media global juga dapat bekerja sama dengan media lokal untuk menciptakan narasi yang lebih kontekstual. Alih-alih berbicara tentang komunitas, media bisa berbicara bersama komunitas, melibatkan jurnalis lokal, aktivis perempuan setempat, dan organisasi masyarakat sipil. Penting untuk menjaga keseimbangan antara urgensi dan empati. Isu deepfake pornografi adalah serius dan mendesak, namun pemberitaannya tetap harus menghormati privasi dan martabat korban. Penggunaan nama samaran, penyamaran visual, dan persetujuan korban dalam publikasi adalah langkah penting dalam praktik jurnalisme etis (Jufri & Putra, 2021). Dengan menghadirkan analisis yang mendalam, bukan hanya berita singkat, media bisa membantu audiens memahami kompleksitas masalah ini. Hal ini mencakup keterkaitan antara kapitalisme digital, misogini, kolonialisme budaya, dan otoritarianisme dalam membentuk lanskap kekerasan terhadap perempuan.

Dalam jangka panjang, media global perlu mendukung pembangunan ekosistem digital yang adil gender. Ini berarti mendukung lebih banyak perempuan dalam dunia teknologi, mendorong kebijakan anti-diskriminasi di platform digital, serta mempromosikan pendekatan desain teknologi yang berpihak pada hak asasi manusia (Mahardika, 2025). Akhirnya, pemberdayaan perempuan lewat media tidak cukup hanya dengan representasi. Dibutuhkan transformasi cara kerja, nilai, dan visi media itu sendiri. Ketika media memilih untuk berpihak pada keadilan dan kesetaraan, ia bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga agen perubahan sosial yang nyata.

KESIMPULAN

Fenomena deepfake pornografi sebagai produk dari media global menunjukkan bagaimana teknologi dan budaya digital dapat digunakan untuk merekonstruksi identitas gender perempuan dengan cara yang merugikan. Dalam konteks budaya konservatif, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai-nilai Timur yang kuat, dampaknya menjadi lebih kompleks. Perempuan tidak hanya menjadi korban eksploitasi visual, tetapi juga menghadapi stigma sosial dan sanksi moral yang berakar dari norma-norma lokal. Ini menunjukkan bahwa media global tidak netral; ia membawa nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu yang kerap kali tidak sejalan dengan konteks lokal. Perbandingan antara perspektif Barat dan Timur menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, keduanya belum sepenuhnya berhasil

melindungi martabat perempuan dari eksploitasi. Perspektif Barat yang mengedepankan kebebasan individu kadang luput dalam membaca konsekuensi sosial dan psikologis dari eksposur digital terhadap tubuh perempuan. Sebaliknya, perspektif Timur yang berakar pada kolektivitas dan kehormatan keluarga sering kali menyalahkan korban dan memperparah marginalisasi. Kesamaan keduanya terletak pada kegagalan dalam menghadirkan sistem perlindungan yang adil dan sensitif terhadap gender. Melalui metode analisis wacana kritis, artikel ini menunjukkan bahwa media global memiliki potensi ambivalen: di satu sisi bisa menjadi alat reproduksi stereotip gender dan dehumanisasi, namun di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk membongkar narasi dominan yang menindas. Dengan menyisipkan narasi alternatif yang merepresentasikan perempuan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif, media dapat berperan dalam membangun pemahaman baru yang lebih adil dan kontekstual mengenai identitas gender. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi lintas budaya yang tidak hanya menerjemahkan pesan global ke dalam konteks lokal, tetapi juga mengangkat suara lokal ke panggung global. Pemberdayaan perempuan melalui media harus berbasis pada pendekatan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman budaya, sejarah, dan nilai lokal. Dengan cara ini, media tidak menjadi alat penindasan baru, tetapi jembatan untuk solidaritas dan transformasi sosial yang lebih setara gender. Akhirnya, resistensi lokal terhadap media global bukan berarti penolakan mutlak, melainkan upaya negosiasi makna yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan seperti deepfake pornografi, kolaborasi antara nilai-nilai lokal yang progresif dan pemanfaatan teknologi yang etis dapat menciptakan ruang baru bagi perempuan untuk berdaya, tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

REFERENSI

- Adena Fitri Puspita Sari & Adi Sulistiyono. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 97–107. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>
- Adnasohn Aqilla Respati, A. D. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, 2(2), 586–592. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12508126>

- Agung, A., Hafrida, H., & Erwin, E. (2023). Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 212–222. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>
- Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 25(01), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>
- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPAKE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Universitas Islam Malang*, 30(1), 9675–9691.
- Azkia, N., Adriyanto, A. R., Putri, S., Zhafira, A. A., & Syafii, A. D. (2024). Analisis User Experience dan Emosi Pengguna pada Aplikasi Deepfake (Faceplay dan Reface). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7031–7038. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4729>
- Christina Basanova, Y. S. K. (2025). Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 149–164.
- Fernandes, Y. A., & Fatma, Y. (2025). METODE DEEP LEARNING DALAM TEKNOLOGI DEEPPAKE : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 3403–3410.
- Hapid, F. M., Suntana, I., & Royani, M. Y. (2024). Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1155–1174. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>
- Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 31–57. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3(1), 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>
- Mahardika, M. I. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DEEPPAKE PORN SEBAGAI KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE MENURUT UU PORNOGRAFI. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(5), 21–33.

- Mrs Supriya Shree, Riddhi Arya, & Saket Kumar Roy. (2024). Investigating the Evolving Landscape of Deepfake Technology: Generative AI's Role in it's Generation and Detection. *International Research Journal on Advanced Engineering Hub (IRJAEH)*, 2(05), 1489–1511. <https://doi.org/10.47392/IRJAEH.2024.0206>
- Mu, J., Adrezo, M., & Haikal, A. N. (2024). Identifikasi Wajah Asli dan Buatan Deepfake Menggunakan Metode Convolutional Neural Network. *Teknika*, 13(1), 45–50. <https://doi.org/10.34148/teknika.v13i1.705>
- Mutmainnah, A., Suhandi, A. M., & Herlambang, Y. T. (2024). Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital. *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2022). JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI DEEPPAKE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Universitas Negeri Surabaya*, 1(1), 1–18.
- Rahman, A. N. F., & Bari, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake. *UNJA Journal of LegalStudies*, 1(2), 110–128.
- Rakhmawati, R. (2024). PUANOGRAFI: Studi Interpretasi Tren Kerentanan Perempuan Dari Perspektif Lintas Agama Pada Teknologi Deepfake. *Journal homepage: Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora (SISH)*, 1(02), 64–75.
- Rendi Syaputra. (2024). URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPPAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(3), 1–13.
- Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1779–1794.
- Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X). *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13215–13231.
- Syahirah, S. N., & Prasetyo, B. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI DEEPPAKE UNTUK PORNOGRAFI MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN*, 6(1), 191–212.

- Untung Sumarwan, A. H. (2025). Analisis Kriminologi Deepfake Melalui Media Sosial Berdasarkan Teori Rational Choice. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 323–331.
- Wirakusunah, G. (2024). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN SEJARAH PAHLAWAN INDONESIA MENGGUNAKAN DEEP FAKE DENGAN METODE MULTIMEDIA DEVELOPMENT LIFE CYCLE. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4171>